

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini meneliti tentang pengaruh ukuran pemerintah daerah (*size*), tingkat kemakmuran (*wealth*), *intergovernmental revenue*, belanja daerah, dan *leverage* terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan uji normalitas, uji autokorelasi, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas tidak ditemukan variabel yang menyimpang dari asumsi klasik. Hal tersebut menunjukkan bahwa data yang tersedia telah memenuhi syarat untuk menggunakan model persamaan regresi linier berganda dengan program SPSS versi 25. Data sampel sebanyak 140 LHP LKPD Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah yang diaudit oleh BPK.

Dalam penelitian ini mencoba untuk meneliti apakah ukuran pemerintah daerah (*size*), tingkat kemakmuran (*wealth*), *intergovernmental revenue*, belanja daerah, dan *leverage* berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2019, 2020, 2021 dan 2022. Hasil model regresi berganda menunjukkan jika ukuran pemerintah daerah (*size*), tingkat kemakmuran (*wealth*), *intergovernmental revenue*, belanja daerah, dan *leverage* berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintahan daerah.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan maka peneliti akan memberikan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Ukuran (*size*) daerah yang diukur dengan total aktiva memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Semakin besar ukuran (*size*) pemerintah daerah maka semakin baik kinerja keuangan pemerintah daerah tersebut. Hal ini dapat dijadikan pembenaran tentang *size* yang besar dapat membantu kegiatan operasional pemerintah

daerah yang diiringi dengan meningkatnya kinerja keuangan pemerintah daerah.

2. Berdasarkan analisis regresi tingkat kemakmuran (*wealth*) secara signifikan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah disebabkan belum maksimalnya peran Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah. Semakin besar PAD di suatu daerah maka tingkat kemakmuran dan pelayanan terhadap masyarakat akan semakin rendah. semakin tinggi tingkat kemakmuran maka semakin rendah kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa masih banyak peran PAD kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah belum meningkatkan kinerja keuangan pemerintah atau belum dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
3. *Intergovernmental revenue* terbukti secara signifikan memiliki pengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. *Intergovernmental revenue* merupakan dana yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah agar digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan sehingga dapat terlaksananya pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Semakin tinggi ketergantungan Pemerintah daerah pada pemerintah pusat maka diharapkan semakin baik pelayanan Pemerintah daerah kepada masyarakatnya sehingga kinerja Pemerintah daerah juga semakin meningkat. Namun, dalam penelitian ini hasil uji menandakan semakin tinggi tingkat *intergovernmental revenue* maka semakin rendah kinerja keuangan pemerintah daerah.
4. Hasil analisis regresi linier berganda, variabel belanja daerah menunjukkan bahwa belanja daerah secara signifikan memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, yang mengindikasikan semakin banyak belanja daerah yang dikeluarkan oleh suatu daerah maka akan semakin baik kinerja pemerintah daerah tersebut.

Pengelolaan belanja daerah dengan efisien dan tepat akan meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah.

5. Pada penelitian ini dapat disimpulkan jika *leverage* secara signifikan memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini dapat dijelaskan karena semakin besar *leverage* maka pengawasan yang dilakukan kreditor semakin ketat, sehingga pemerintah daerah akan melakukan kinerja keuangan yang baik untuk mendapatkan kepercayaan dari para kreditor.

5.2 Keterbatasan

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yaitu:

1. Variabel X dalam penelitian ini tidak menggambarkan keseluruhan faktor-faktor yang memberikan pengaruh pada kinerja keuangan pemerintahan daerah.
2. Data penelitian ini sangat terbatas, hanya sebatas pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah.
3. Data penelitian yang digunakan hanya dari periode 2019-2022.
4. Riset ini menggunakan rasio efisiensi untuk mengukur kinerja keuangan pemerintahan daerah, rasio tersebut belum banyak digunakan oleh penelitian sebelumnya, sehingga tidak banyak referensi yang mendukung.

5.3 Saran

5.3.1 Saran Bagi Pemerintah Daerah

Melalui hasil dan pembahasan dapat diketahui jika pemerintah daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah menunjukkan kinerja yang belum maksimal ataupun kurang efisiensi, memperbaiki dan meningkatkan kinerja keuangan semaksimal mungkin dengan cara pemerintah daerah dapat mengelola APBD dengan bijak untuk menciptakan efisiensi anggaran.

5.3.2 Saran Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk menggunakan laporan keuangan yang telah diaudit oleh BPK sehingga memberikan gambaran yang lebih baik dan juga pasti. Peneliti selanjutnya juga disarankan untuk menambahkan variabel lain yang memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan daerah dan juga dapat menambah sampel dalam penelitian yang digunakan.



DAFTAR PUSTAKA

Afriani, Galang, R. Adri Satriawan Surya, dan Alfiati Silfi. 2016. “Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah, Temuan Audit (BPK) Dan *Leverage* Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Riau).” *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Ekonomi* 3 (1): 1036–50.

Artha, Risma Diri, Prayitno Basuki, dan Alamsyah MT Mt. 2015. “Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi NTB).” *InFestasi* 11 (2): 214–29. <https://doi.org/10.21107/infestasi.v11i2.1133.g1406>.

Aziz, Asmaul. 2016. “Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota Di Jawa Timur).” *Eksis: Jurnal Riset Ekonomi dan Bisnis* 11 (1). <https://doi.org/10.26533/eksis.v11i1.34>.

“BPS Provinsi Jawa Tengah.” t.t. Diakses 29 Juli 2023. <https://jateng.bps.go.id/statictable/2020/06/11/1792/penduduk-laju-pertumbuhan-penduduk-distribusi-persentase-penduduk-kepadatan-penduduk-rasio-jenis-kelamin-penduduk-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-tengah-2010-2019---2021.html>.

Budiarto, Dekeng Setyo, dan Luki Indarti. 2019. “Apakah Karakteristik Pemerintah Daerah Berpengaruh Pada Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah? Riset Pada Kabupaten Di Jawa Tengah.” *Jurnal Akuntansi Bisnis* 12 (1). <https://journal.ubm.ac.id/index.php/akuntansi-bisnis/article/view/1549>.

“Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan | Apa Saja Jenis-Jenis Dana Perimbangan?” t.t. Diakses 30 Juli 2023. <https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-jenis-jenis-dana-perimbangan>.

Febriyanti, Ardiyan Natoen Ayu, dan Sarikadarwati Susi Ardiani. 2019. “Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Sumatera Selatan (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Sumatera Selatan Tahun 2013-2017).” *Jurnal Riset Terapan Akuntansi* 3 (2): 106–17. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3837691>.

Handayani, Nurul Sukma, Dwi Risma Deviyanti, dan Muhammad Abadan Syakura. 2019. “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kota Di Kalimantan Timur.” *Jurnal Ilmu Akuntansi Mulawarman (JIAM)* 4 (1). <https://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/JIAM/article/view/3724>.

Hasanah, Nurmalia, dan Achmad Fauzi. t.t. “Akuntansi Pemerintahan.”

Jateng, Redaksi Kanwil DJPb. 2023. “Konferensi Pers Kinerja Fiskal Provinsi Jawa Tengah Periode sd 30 April 2023.” 23 Mei 2023. <https://djpj.kemenkeu.go.id/kanwil/jateng/id/data-publikasi/berita-terbaru/3250-konferensi-pers-kinerja-fiskal-provinsi-jawa-tengah-periode-sd-30-april-2023.html>.

Kirana, Akhila Santika, dan Sulardi Sulardi. 2020. “Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Opini Audit Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Indonesia Tahun 2018).” *Jurnal Aakuntansi Dan Manajemen Mutiara Madani* 8 (2): 175–92.

Kusumawardani, Media. 2012. “Pengaruh *Size*, Kemakmuran, Ukuran Legislatif, *Leverage* Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia.” *Accounting Analysis Journal* 1 (1). <https://doi.org/10.15294/aaj.v1i1.453>.

Marfiana, Nandhya, dan Lulus Kurniasih. 2013. “Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Hasil Pemeriksaan Audit BPK Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah

Daerah Kabupaten/Kota.” *Sustainable Competitive Advantage (SCA)* 3 (1).
<http://jp.feb.unsoed.ac.id/index.php/sca-1/article/view/312>.

Maulana, Candra, dan Bestari Dwi Handayani. 2015a. “Pengaruh Karakteristik, Kompleksitas Pemerintahan Dan Temuan Audit Terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib LKPD.” *Accounting Analysis Journal* 4 (4).
<https://doi.org/10.15294/aaj.v4i4.9107>.

Natariasari, Rizka, Yusrarlaini Yusrarlaini, dan Gita Maiyora. 2015. “Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota (Studi Empiris Kabupaten/kota di Pulau Sumatera).” *Journal:eArticle, Universitas Riau*. <https://www.neliti.com/id/publications/33881/>.

Noviyanti, Nur Ade, dan Kiswanto Kiswanto. 2016. “Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Hasil Pemeriksaan Audit BPK Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.” *Accounting Analysis Journal* 5 (1).
<https://doi.org/10.15294/aaj.v5i1.9759>.

Nugroho, Tatas Ridho, dan Novi Eko Prasetyo. 2018. “Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Jawa Timur.” *Assets: Jurnal Akuntansi dan Pendidikan* 7 (1): 27–34.
<https://doi.org/10.25273/jap.v7i1.1823>.

Object, object. t.t. “Pengaruh karakteristik pemerintah daerah dan temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan terhadap kinerja keuangan kabupaten/kota.” Diakses 14 Agustus 2023. <https://core.ac.uk/reader/292104880>.

Okfitasari, Antin, Sundari Sundari, dan Ety Meikhati. 2020. “Karakteristik Pemerintah Daerah, Opini Dan Ketepatanwaktuan Laporan Keuangan di Indonesia.” *Jurnal Akuntansi Dan Pajak* 21 (01). <https://doi.org/10.29040/jap.v21i1.1018>.

“Otonomi dan manajemen keuangan daerah / Mardiasmo | Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Makassar.” t.t. Diakses 29 Juli 2023. <https://library.unismuh.ac.id/opac/detail-opac?id=104235>.

Pendidikan, Fajar. 2021. “Pengertian Sampel Menurut Para Ahli dan Secara Umum.” Fajar Pendidikan. 6 Desember 2021. <https://www.fajarpendidikan.co.id/pengertian-sampel-menurut-para-ahli-dan-secara-umum/>.

“Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah | Eksis: Jurnal Riset Ekonomi dan Bisnis.” t.t. Diakses 14 Agustus 2023. <https://ejournal.stiedewantara.ac.id/index.php/001/article/view/34>.

“Penjelasan.” t.t. Diakses 31 Juli 2023. <https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2009/8Tahun2009UUPenjel.htm>.

Qowi, Rizal, dan Tri Jatmiko Wahyu Prabowo. 2017. “Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dan Temuan Pemeriksaan Audit BPK Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Indonesia Tahun Anggaran 2012.” *Diponegoro Journal of Accounting* 6 (1): 298–310.

Ratnasari, Ayu Dewi. 2016. “Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Temuan Audit BPK RI Terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Provinsi di Indonesia Periode 2012-2014),” Desember. <http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/7950>.

Sihite, Renny Novsellia, dan Holiawati Holiawati. 2017. “Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi Staf Akuntansi Dan Kualitas Laporan Keuangan.” *Jurnal Aset (Akuntansi Riset)* 9 (2): 81–92. <https://doi.org/10.17509/jaset.v9i2.9231>.

“Struktur Organisasi BPK Jawa Tengah | BPK Perwakilan Propinsi Jawa Tengah.” t.t. Diakses 14 Agustus 2023. <https://jateng.bpk.go.id/struktur-organisasi-2018-baru/>.

Sudarsana, Hafidh Susila, dan Shiddiq Nur Rahardjo. 2013. “Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan terhadap kinerja keuangan daerah (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Indonesia.” *Diponegoro Journal of Accounting* 0 (0): 175–87.



LAMPIRAN

Tahun	Kab/Kota	Size	Wealth	nter_rev	B.Daerah	Leverage	Efesiens
2019	Kab Banjarn	Rp 4,469,370,847,873.06	Rp 0.122	0.639	1.008	0.0046	0.961
2019	Kab Banyum	Rp 6,226,652,415,512.68	Rp 0.200	0.565	0.815	0.0075	0.759
2019	Kab Batang	Rp 2,664,373,528,271.74	Rp 0.139	0.616	0.809	0.0147	0.767
2019	Kab Blora	Rp 3,362,562,896,873.61	Rp 0.109	0.635	0.980	0.0115	0.955
2019	Kab Boyolali	Rp 3,770,144,077,202.44	Rp 0.168	0.609	0.848	0.0069	0.806
2019	Kab Brebes	Rp 4,187,462,596,274.53	Rp 0.122	0.606	0.798	0.0185	0.750
2019	Kab Cilacap	Rp 5,735,055,789,650.53	Rp 0.175	0.588	0.847	0.0081	0.781
2019	Kab Demak	Rp 5,450,473,201,190.25	Rp 0.172	0.539	0.804	0.0044	0.751
2019	Kab Grobog	Rp 3,642,816,444,594.56	Rp 0.133	0.718	0.826	0.0274	0.798
2019	Kab Jepara	Rp 6,496,679,937,376.67	Rp 0.159	0.577	0.797	0.0083	0.770
2019	Kab Karang	Rp 3,476,942,970,374.69	Rp 0.178	0.623	0.874	0.0228	0.771
2019	Kab Kebume	Rp 4,482,323,838,554.00	Rp 0.145	0.599	0.797	0.0063	0.747
2019	Kab Kendal	Rp 3,026,908,855,357.08	Rp 0.157	0.605	0.878	0.0077	0.807
2019	Kab Klaten	Rp 4,157,398,988,909.00	Rp 0.116	0.620	0.713	0.0035	0.628
2019	Kab Kudus	Rp 4,468,531,280,044.62	Rp 0.164	0.621	0.863	0.0103	0.802
2019	Kab Magelar	Rp 3,270,629,440,572.02	Rp 0.162	0.564	0.732	0.0042	0.677
2019	Kab Pati	Rp 6,439,754,615,979.58	Rp 0.128	0.577	0.760	0.0025	0.704
2019	Kab Pekalon	Rp 3,020,680,906,818.08	Rp 0.156	0.606	0.821	0.0094	0.766
2019	Kab Pemalar	Rp 3,786,927,056,410.92	Rp 0.133	0.606	0.797	0.0076	0.822
2019	Kab Purbalir	Rp 2,846,328,687,092.87	Rp 0.147	0.612	0.819	0.0086	0.773
2019	Kab Purwore	Rp 2,987,231,520,048.19	Rp 0.129	0.595	0.774	0.0095	0.737
2019	Kab Rembar	Rp 2,143,033,080,689.93	Rp 0.169	0.577	0.804	0.0342	0.777
2019	Kab Semara	Rp 4,689,787,427,166.48	Rp 0.186	0.585	0.860	0.0079	0.799
2019	Kab Sragen	Rp 3,941,848,384,832.37	Rp 0.160	0.647	0.750	0.0320	0.712
2019	Kab Sukohar	Rp 5,194,655,435,894.62	Rp 0.214	0.579	0.829	0.0045	0.707
2019	Kab Tegal	Rp 3,377,567,475,085.03	Rp 0.158	0.576	0.802	0.0105	0.788
2019	Kab Temang	Rp 3,240,096,678,946.35	Rp 0.148	0.603	0.777	0.0170	0.744
2019	Kab Wonogi	Rp 3,740,376,254,030.79	Rp 0.118	0.653	0.853	0.0070	0.777
2019	Kab Wonosc	Rp 3,390,531,356,578.04	Rp 0.122	0.631	0.875	0.0021	0.793
2019	Kota Magela	Rp 4,012,816,686,651.14	Rp 0.283	0.593	1.028	0.0005	0.902
2019	Kota Pekalo	Rp 2,856,674,222,675.30	Rp 0.219	0.628	0.982	0.0091	0.911
2019	Kota Salatig	Rp 3,072,155,684,616.59	Rp 0.254	0.614	1.015	0.0061	0.815
2019	Kota Semara	Rp 18,159,413,566,476.00	Rp 0.453	0.381	1.015	0.0042	0.983
2019	Kota Suraka	Rp 11,719,105,713,695.20	Rp 0.281	0.571	1.034	0.0051	0.950
2019	Kota Tegal	Rp 2,417,612,856,682.85	Rp 0.275	0.619	0.883	0.0135	0.772
2020	Kab Banjarn	Rp 4,528,919,724,975.62	Rp 0.120	0.621	1.018	0.0048	0.980
2020	Kab Banyum	Rp 6,540,515,839,032.71	Rp 0.201	0.557	0.807	0.0083	0.760
2020	Kab Batang	Rp 2,909,762,489,944.75	Rp 0.149	0.582	0.779	0.0229	0.738
2020	Kab Blora	Rp 3,382,901,824,152.56	Rp 0.141	0.592	0.988	0.0083	0.946
2020	Kab Boyolali	Rp 4,227,690,989,734.95	Rp 0.190	0.569	0.828	0.0074	0.799
2020	Kab Brebes	Rp 3,740,761,434,711.88	Rp 0.130	0.568	0.751	0.0180	0.724
2020	Kab Cilacap	Rp 6,047,267,120,679.74	Rp 0.188	0.558	0.827	0.0053	0.765
2020	Kab Demak	Rp 5,697,120,718,057.40	Rp 0.188	0.506	0.792	0.0028	0.734
2020	Kab Grobog	Rp 3,771,022,502,288.97	Rp 0.139	0.691	0.827	0.0275	0.803

2020 Kab Jepara	Rp	6,626,878,048,524.50	Rp	0.181	0.553	0.822	0.0073	0.770
2020 Kab Karanga	Rp	4,422,303,404,841.81	Rp	0.181	0.588	0.825	0.0137	0.776
2020 Kab Kebume	Rp	4,525,738,172,682.03	Rp	0.146	0.588	0.774	0.0093	0.724
2020 Kab Kendal	Rp	3,130,779,619,644.84	Rp	0.167	0.576	0.772	0.0156	0.741
2020 Kab Klaten	Rp	3,566,777,871,038.34	Rp	0.128	0.588	0.706	0.0059	0.610
2020 Kab Kudus	Rp	4,670,496,301,414.84	Rp	0.190	0.587	0.816	0.0085	0.747
2020 Kab Magel	Rp	3,429,577,837,888.45	Rp	0.139	0.559	0.688	0.0062	0.632
2020 Kab Pati	Rp	6,254,897,635,666.18	Rp	0.140	0.565	0.771	0.0028	0.725
2020 Kab Pekalon	Rp	3,066,064,901,782.83	Rp	0.166	0.585	0.996	0.0181	0.926
2020 Kab Pemala	Rp	3,803,001,551,340.07	Rp	0.134	0.604	0.892	0.0131	0.784
2020 Kab Purbalir	Rp	2,769,994,111,890.32	Rp	0.161	0.586	0.768	0.0150	0.724
2020 Kab Purwor	Rp	3,108,457,930,732.89	Rp	0.141	0.565	0.738	0.0097	0.703
2020 Kab Rembar	Rp	2,346,462,043,810.98	Rp	0.174	0.539	0.759	0.0233	0.758
2020 Kab Semara	Rp	4,888,861,215,817.10	Rp	0.202	0.561	0.841	0.0081	0.094
2020 Kab Sragen	Rp	4,087,577,565,236.07	Rp	0.178	0.631	0.807	0.0093	0.734
2020 Kab Sukohar	Rp	5,674,969,987,939.30	Rp	0.230	0.570	0.847	0.0049	0.714
2020 Kab Tegal	Rp	3,604,540,958,067.27	Rp	0.166	0.557	0.758	0.0104	0.740
2020 Kab Temang	Rp	3,184,697,915,399.87	Rp	0.168	0.572	0.747	0.0149	0.704
2020 Kab Wonogi	Rp	3,821,069,295,193.67	Rp	0.121	0.638	0.837	0.0077	0.762
2020 Kab Wonosc	Rp	3,441,342,186,114.36	Rp	0.134	0.598	0.818	0.0044	0.757
2020 Kota Magela	Rp	4,160,262,610,517.39	Rp	0.671	0.555	0.844	0.0006	0.761
2020 Kota Pekalo	Rp	2,921,917,451,388.13	Rp	0.241	0.595	0.991	0.0061	0.894
2020 Kota Salatig	Rp	3,122,697,428,676.77	Rp	0.247	0.586	1.061	0.0114	0.859
2020 Kota Semara	Rp	21,003,912,081,270.80	Rp	0.460	0.379	0.938	0.0053	0.936
2020 Kota Suraka	Rp	12,135,931,598,222.30	Rp	0.269	0.571	0.895	0.0067	0.849
2020 Kota Tegal	Rp	2,396,957,279,062.12	Rp	0.262	0.612	1.029	0.0188	0.844
2021 Kab Banjarn	Rp	4,611,184,734,617.03	Rp	0.150	0.600	0.979	0.0053	0.960
2021 Kab Banyum	Rp	7,258,283,031,630.04	Rp	0.218	0.540	0.804	0.0321	0.741
2021 Kab Batang	Rp	3,035,062,150,559.62	Rp	0.177	0.586	0.791	0.0178	0.726
2021 Kab Blora	Rp	3,536,211,050,648.78	Rp	0.147	0.632	0.946	0.0101	0.949
2021 Kab Boyolali	Rp	4,658,596,971,686.12	Rp	0.212	0.680	0.777	0.0064	0.742
2021 Kab Brebes	Rp	3,838,478,619,191.23	Rp	0.164	0.545	0.989	0.0071	0.944
2021 Kab Cilacap	Rp	6,345,078,297,174.14	Rp	0.222	0.536	0.999	0.0102	0.914
2021 Kab Demak	Rp	5,914,642,693,556.08	Rp	0.188	0.520	0.803	0.0060	0.740
2021 Kab Groboga	Rp	4,133,213,033,678.64	Rp	0.161	0.701	0.922	0.0063	0.914
2021 Kab Jepara	Rp	6,674,428,413,014.89	Rp	0.172	0.690	0.970	0.0068	0.896
2021 Kab Karanga	Rp	4,882,484,122,308.37	Rp	0.197	0.584	0.831	0.0144	0.780
2021 Kab Kebume	Rp	4,678,346,895,120.94	Rp	0.167	0.568	0.982	0.0137	0.912
2021 Kab Kendal	Rp	3,626,991,028,095.36	Rp	0.191	0.562	0.900	0.0070	0.834
2021 Kab Klaten	Rp	3,515,210,592,463.72	Rp	0.123	0.596	0.708	0.0024	0.613
2021 Kab Kudus	Rp	4,850,177,079,997.88	Rp	0.234	0.573	0.751	0.0070	0.665
2021 Kab Magel	Rp	3,597,390,329,880.28	Rp	0.152	0.558	0.717	0.0104	0.648
2021 Kab Pati	Rp	6,356,447,372,037.16	Rp	0.143	0.558	0.779	0.0065	0.751
2021 Kab Pekalon	Rp	3,140,697,646,888.52	Rp	0.167	0.580	0.999	0.0064	0.929
2021 Kab Pemala	Rp	3,889,677,659,868.34	Rp	0.140	0.595	0.778	0.0160	0.745
2021 Kab Purbalir	Rp	2,857,441,202,742.83	Rp	0.184	0.575	0.782	0.0133	0.724
2021 Kab Purwor	Rp	3,303,359,268,867.61	Rp	0.191	0.554	0.932	0.0125	0.883

2021 Kab Rembar	Rp	2,504,076,268,459.96	Rp	0.211	0.540	0.961	0.0122	0.933
2021 Kab Semarang	Rp	5,297,004,928,246.29	Rp	0.238	0.523	0.777	0.0139	0.721
2021 Kab Sragen	Rp	4,223,594,001,345.34	Rp	0.230	0.567	0.925	0.0081	0.807
2021 Kab Sukoharjo	Rp	6,298,329,078,066.73	Rp	0.249	0.543	0.829	0.0066	0.720
2021 Kab Tegal	Rp	3,840,424,064,103.19	Rp	0.206	0.536	0.798	0.0113	0.744
2021 Kab Temanggung	Rp	3,420,435,895,674.96	Rp	0.184	0.569	0.953	0.0201	0.881
2021 Kab Wonorejo	Rp	3,911,948,544,251.81	Rp	0.105	0.645	0.838	0.0085	0.762
2021 Kab Wonorejo	Rp	3,761,876,565,856.17	Rp	0.173	0.585	0.776	0.0152	0.724
2021 Kota Magelang	Rp	4,337,393,562,510.68	Rp	0.321	0.533	0.940	0.0006	0.760
2021 Kota Pekalongan	Rp	3,048,941,837,080.65	Rp	0.261	0.629	0.996	0.0074	0.893
2021 Kota Salatiga	Rp	3,200,391,773,223.50	Rp	0.297	0.565	1.011	0.0100	0.871
2021 Kota Semarang	Rp	21,533,658,423,314.90	Rp	0.495	0.3524	0.988	0.0054	0.945
2021 Kota Surakarta	Rp	12,714,848,249,292.00	Rp	0.289	0.545	0.962	0.0038	0.859
2021 Kota Tegal	Rp	2,453,865,023,296.71	Rp	0.299	0.599	1.057	0.0269	0.889
2022 Kab Banjarnegara	Rp	4,620,882,359,126.76	Rp	0.139	0.636	0.997	0.0072	0.965
2022 Kab Banyuwangi	Rp	7,380,298,086,900.23	Rp	0.240	0.558	0.861	0.0332	0.767
2022 Kab Batang	Rp	3,088,215,436,296.77	Rp	0.172	0.626	0.831	0.0120	0.750
2022 Kab Blora	Rp	3,707,159,076,206.09	Rp	0.150	0.639	1.097	0.0433	0.941
2022 Kab Boyolali	Rp	4,866,282,153,877.35	Rp	0.187	0.618	0.883	0.0057	0.798
2022 Kab Brebes	Rp	4,103,220,770,172.46	Rp	0.140	0.7707	1.034	0.0086	0.978
2022 Kab Cilacap	Rp	6,631,042,215,504.95	Rp	0.213	0.694	1.033	0.0048	0.949
2022 Kab Demak	Rp	5,873,599,121,166.97	Rp	0.199	0.547	0.852	0.0040	0.780
2022 Kab Grobogan	Rp	4,641,695,081,023.27	Rp	0.164	0.745	1.038	0.0283	0.930
2022 Kab Jepara	Rp	6,490,924,797,534.80	Rp	0.184	0.601	1.044	0.0056	0.945
2022 Kab Karanganyar	Rp	5,707,764,134,619.13	Rp	0.227	0.599	0.820	0.0049	0.838
2022 Kab Kebumeharjo	Rp	4,628,824,366,868.65	Rp	0.180	0.599	0.992	0.0080	0.917
2022 Kab Kendal	Rp	3,389,246,354,048.56	Rp	0.193	0.602	1.103	0.0091	0.944
2022 Kab Klaten	Rp	3,535,972,154,908.27	Rp	0.138	0.615	0.724	0.0033	0.616
2022 Kab Kudus	Rp	5,006,456,634,422.13	Rp	0.201	0.633	0.944	0.0037	0.749
2022 Kab Magelang	Rp	3,684,855,922,612.58	Rp	0.169	0.579	1.005	0.0058	0.901
2022 Kab Pati	Rp	6,328,367,775,226.28	Rp	0.144	0.584	0.738	0.0037	0.693
2022 Kab Pekalongan	Rp	3,212,211,226,631.19	Rp	0.165	0.608	1.024	0.0061	0.944
2022 Kab Pemalang	Rp	3,832,086,881,377.47	Rp	0.140	0.648	0.816	0.0111	0.768
2022 Kab Purbalingga	Rp	2,889,081,522,998.10	Rp	0.151	0.648	0.848	0.0102	0.768
2022 Kab Purwokerto	Rp	3,456,215,083,542.67	Rp	0.151	0.602	1.074	0.0126	0.946
2022 Kab Rembang	Rp	2,539,964,136,746.00	Rp	0.192	0.591	1.082	0.0379	0.986
2022 Kab Semarang	Rp	5,333,665,669,486.79	Rp	0.205	0.594	0.933	0.0060	0.801
2022 Kab Sragen	Rp	4,246,346,568,875.25	Rp	0.167	0.648	0.897	0.0110	0.733
2022 Kab Sukoharjo	Rp	6,484,478,238,479.96	Rp	0.246	0.580	0.842	0.0026	0.727
2022 Kab Tegal	Rp	3,856,466,506,432.21	Rp	0.194	0.592	0.805	0.0100	0.738
2022 Kab Temanggung	Rp	3,306,613,896,619.54	Rp	0.163	0.764	1.033	0.0123	0.916
2022 Kab Wonorejo	Rp	3,963,260,372,899.82	Rp	0.147	0.677	0.834	0.0062	0.757
2022 Kab Wonorejo	Rp	3,870,278,837,496.62	Rp	0.138	0.612	0.872	0.0076	0.777
2022 Kota Magelang	Rp	4,267,505,926,781.79	Rp	0.383	0.533	1.055	0.0007	0.953
2022 Kota Pekalongan	Rp	3,274,386,243,680.24	Rp	0.266	0.621	1.043	0.0036	0.913
2022 Kota Salatiga	Rp	3,210,215,244,988.36	Rp	0.262	0.597	1.015	0.0067	0.777
2022 Kota Semarang	Rp	22,467,914,755,459.00	Rp	0.512	0.360	0.980	0.0031	0.620

2022 Kota Surakarta	Rp	13,346,911,193,229.90	Rp	0.319	0.570	1.029	0.0036	0.891
2022 Kota Tegal	Rp	2,536,886,700,325.25	Rp	0.326	0.595	1.082	0.0125	0.967

